

GENDER DAN PEMBANGUNAN DI DUNIA KETIGA

Sukawarsini Djelantik¹

Abstract

The development process affects women and men differentially. The after effects of colonialism and the peripheral position of Third World countries in the world economy exacerbate the effects of sexual discrimination on women. The penetration of capitalism, leading to the modernization and restructuring of traditional economies often increases the disadvantages suffered by women as the modern sector takes over many of the economic activities, such as food processing and making of clothes, which had long been the means by which women supported themselves and their families. A majority of the new and better paid jobs go to men but the male income is less likely to be spent on the family. The paper discusses the role of women and development, as a strategic issue in most developing countries includes Indonesia and to increase understanding on the importance of gender mainstreaming program being implemented in government policies to increase women bargaining position.

Keywords: *women, gender, feminism, women in development, gender mainstreaming.*

"If you educate a man, you educate an individual, if you educate a women, you educate a nation" (Ghanaian Dr. James Emmanuel Kwegyir-Aggrey (1875-19270

"Human development and human rights are enshrined in today's world. But they have not yet become the core values of our reality. The stability and success of any country will not be secure until we are able to spread the benefits in a more equitable manner.

The obscene wealth of the few cannot be at the expense of the hungry and the destitute.

(Reverend Desmond M. Tutu Anglican Archbishop Emeritus of Cape Town)

¹ Dosen Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, email sukcdj@home.unpar.ac.id

Pendahuluan

Perempuan merupakan setengah dari populasi dunia tetapi jumlah penduduk buta huruf lebih besar daripada laki-laki. Lebih jauh lagi, perempuan menanggung beban dua-pertiga dari jam pekerjaan, tetapi hanya memperoleh penghasilan sebanyak 10 persen dari total pendapatan, dan memiliki hanya sebesar 1 persen dari harta keluarga. Data lain menunjukkan bahwa perempuan memproduksi lebih dari setengah jumlah makanan yang ditanam secara lokal di negara-negara berkembang, sedangkan untuk kasus Afrika sebanyak 80 %.²

Situasi pasca kolonisasi, dan posisi terpingirkan dari negara-negara miskin di selatan dan negara-negara yang tengah mengalami transisi di dalam era globalisasi, berpengaruh dalam kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Masuknya modal dari negara-negara maju, yang membawa modernisasi dan restrukturisasi perekonomian, seringkali menyebabkan kerugian bagi posisi perempuan. Teknologi modern mengambil alih banyak aktivitas perekonomian, misalnya, proses produksi makanan, menenun kain dan menjahit pakaian, yang sebelumnya merupakan aktivitas perempuan untuk membantu dirinya sendiri dan mendukung perekonomian keluarganya. Terbebasnya perempuan dari aktivitas-aktivitas yang banyak menyita waktu ini, menyebabkan perempuan mempunyai kebebasan melakukan aktivitas-aktivitas perekonomian di luar rumah, yang mungkin lebih baik dari segi penghasilan. Akan tetapi, kebanyakan pekerjaan yang memberikan upah lebih baik dan melibatkan teknologi modern dilakukan laki-laki. Padahal, penghasilan perempuan lebih banyak dimanfaatkan untuk kesejahteraan keluarga secara langsung dibandingkan pendapatan dari laki-laki.³

Modernisasi pertanian juga memunculkan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Kondisi ini menyebabkan semakin meningkatnya ketergantungan perempuan terhadap status dan bidang pekerjaan khusus. Perempuan menjadi kehilangan pengawasan terhadap sumber daya seperti tanah, selain kesulitan mendapatkan informasi dan metode-metode pertanian yang lebih maju. Mobilitas laki-laki juga lebih tinggi daripada perempuan, misalnya dalam memilih lokasi bekerja ataupun kemampuan pindah pekerjaan.

² Janet H. Momsen, 1991, *Women and Development in the Third World*, 1994, Routhledge, London, hal. 1-2

³ *ibid.*

Lebih banyak perempuan yang tinggal di rumah untuk mengasuh anak menyebabkan terbatasnya aktivitas publik bagi perempuan. Di beberapa negara, khususnya di Timur Tengah, Asia-Selatan, dan Amerika Latin, perempuan tidak dapat melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tambahan atau untuk bekerja di tempat jauh tanpa ijin dari suami maupun ayah mereka.

Perempuan juga sering berperan ganda bila memutuskan bekerja, karena harus bertanggungjawab terhadap rumah tangga, pengasuhan anak, dan menyediakan makanan. Di seluruh dunia, jam kerja perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Tekanan hubungan gender ketika status perempuan berubah, restrukturisasi ekonomi yang cepat dikombinasikan dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga, merupakan isu yang penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan pembangunan.

Data dari setiap negara menunjukkan bahwa gaji yang diterima perempuan umumnya lebih sedikit selain menempati status yang paling rendah. Sangat jelas bahwa posisi perempuan bersifat rentan dan tidak sejajar dengan laki-laki. Posisi perempuan berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Variasi ini semakin tampak di negara-negara dunia ketiga. Hubungan antara faktor geografis dan pembangunan merupakan hal yang penting ketika membahas perbedaan gender.

Pemikiran yang muncul sebelum tahun 1970an meyakini bahwa proses pembangunan berpengaruh sama terhadap laki-laki dan perempuan. Produktivitas diukur melalui tingkat perekonomian secara umum, sementara kebanyakan jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak dimasukkan sebagai aktivitas ekonomi. Fakta kemudian menunjukkan bahwa meningkatnya pembangunan ekonomi suatu negara tidak secara otomatis menghapus kemiskinan. Hal ini terutama tampak pada proses pembangunan yang menerapkan ekonomi yang menerapkan kebijakan pembangunan dari atas-kebawah (*top-down effect*). Distribusi dan pemerataan keuntungan bagi seluruh elemen masyarakat kemudian menjadi hal yang penting dalam teori pembangunan. Penelitian mengenai perempuan di dunia ketiga menantang asumsi paling mendasar mengenai pembangunan internasional, sehingga analisis gender perlu dimasukkan dalam penelitian mengenai proses pembangunan. Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan teoritis yang baru.

Pemikiran yang mengatakan bahwa perempuan dapat terlibat dalam moda pembangunan yang ada tanpa melakukan restrukturisasi dalam proses pembangunan, mendapat kritikan dari kaum feminis. Maka muncul sebuah visi alternatif, yaitu *Women And Deveopment (WAD)* dan *Women In Development (WID)* yang intinya bukan semata-mata menuntut pembagian kue pembangunan yang lebih besar, tetapi lebih kepada keterlibatan perempuan didalam seluruh aktivitas pembangunan, mulai dari mempersiapkan, mengolah, dan pembagian secara adil.

Feminisme dan Analisis Gender ; Analisis Konsep

Feminisme merupakan salah satu isu global yang cukup mendapatkan perhatian besar dalam mengkaji masalah-masalah internasional.⁴ Pada awalnya feminisme merupakan suatu gerakan yang mengutamakan perjuangan hak-hak politik dan legal perempuan. Kemudian dalam perkembangannya feminisme menjadi lebih dari usaha untuk memperjuangkan persamaan hak. Kini Feminisme berupaya keras untuk memperjuangkan martabat dan membebaskan perempuan dari belenggu struktur atau sistem yang eksploitatif dan subordinatif.

Dalam dua dasawarsa terakhir, telah terjadi suatu proses perubahan paradigma melalui perdebatan yang cukup panjang dalam gerakan feminisme. Perdebatan tersebut terjadi antara pemikiran yang telah lebih difokuskan pada “masalah perempuan”, berhadapan dengan pemikiran yang memfokuskan pada sistem dan struktur masyarakat yang didasarkan pada “analisis gender”. Analisis sosial yang dicetuskan oleh Karl Max nampaknya dapat membantu analisis sosial untuk memahami suatu bentuk ketidakadilan ekonomi dan kaitannya dengan sistem sosial yang lebih luas. Antonio Gramsci membahas ideologi dan kebudayaan dan menggugat keduanya karena dianggap sebagai alat dan bagian dari mereka yang diuntungkan untuk melanggengkan ketidakadilan. Demikian pula Frankfurt mempertanyakan metodologi dan epistemologi positivisme sebagai salah satu sumber dari ketidakadilan.

⁴ Feminisme berasal dari bahasa Latin yang berarti perempuan. Di dalam feminisme terkandung adanya ideologi feminitas yaitu ideologi yang bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan. Feminitas tidak mutlak hanya dimiliki oleh kaum perempuan. Lihat: Nancy Potter, *Journal of Phylosophy, Psychiatry, Psychology*, Vol. 8 No. 1, Maret 2001, John Hopkins University Press, hal. 61-71.

Dari berbagai gugatan terhadap ketidakadilan tersebut, terdapat suatu analisis yang mempertanyakan ketidakadilan sosial dari aspek hubungan antara jenis kelamin, yang belum pernah disinggung oleh teori yang telah disebutkan diatas. Analisis yang dimaksud adalah *analisis gender*. Analisis gender sebagaimana layaknya teori sosial lainnya seperti analisis kelas, analisis kebudayaan, dan analisis wacana merupakan alat analisis untuk memahami realitas sosial. Disamping itu analisis gender membantu memahami bahwa pokok persoalannya adalah sistem dan struktur yang tidak adil, dimana laki-laki maupun perempuan menjadi korban dan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender tersebut. Kaum perempuan mengalami dehumanisasi karena ketidakadilan gender, sementara kaum laki-laki mengalami dehumanisasi karena melanggar penindasan gender.⁵

Memasuki era globalisasi, peranan perempuan bukan hanya sebagai pendamping pria atau hanya mengurus rumahtangga. Perempuan di era globalisasi juga harus bersosialisasi dengan masyarakat dan mengembangkan karirnya. Selama ini seorang perempuan atau istri memang lebih banyak berada di garis belakang atau sebagai 'konco wingking'. Di era reformasi dan jaman modern ini, istilah tersebut perlu ditinjau kembali, apalagi jika mengacu kepada kesetaraan gender. Untuk memahami permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan memudahkan dalam melakukan analisis ketidakadilan gender yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, akan dijelaskan terlebih dahulu perbedaan antara sex dan gender.

Gender dan Seks

Pengertian gender berbeda dengan pengertian seks atau jenis kelamin. Seks atau jenis kelamin adalah pembagian jenis kelamin manusia, perempuan dan laki-laki berdasarkan fisik biologis yang telah ditentukan oleh Tuhan (kodrati), tidak bisa berubah, tidak bisa dipertukarkan dan bersifat universal. Misalnya, perempuan mempunyai vagina, dan rahim, laki-laki mempunyai penis dan buah zakar. Sedangkan gender adalah semua atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki digambarkan memiliki sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah. Dilain pihak perempuan digambarkan memiliki sifat feminin seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat kerja, iklan dan media.

⁵ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hal. 3.

Karena gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang direkonstruksi secara sosial maupun kultural, maka gender dapat dipertukarkan. Gender dapat berubah dari waktu ke waktu, berbeda pada suatu tempat dengan tempat lainnya, dan berbeda dari kelas sosial yang satu dengan kelas sosial lainnya.⁶ Konsep gender penting untuk dipelajari karena:

1. Ketidakpuasan pada gagasan statis tentang jenis kelamin dimana gagasan statis hanya menunjuk pada sosok biologisnya dan tidak memadai untuk menggambarkan perempuan dan laki-laki dalam berbagai kebudayaan.
2. Gender menyiratkan bahwa kategori laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial yang membentuk identitas laki-laki dan perempuan.

Perbedaan gender disebabkan oleh banyak faktor. Perbedaan tersebut dibentuk, disosialisasikan, ataupun diperkuat melalui lingkungan, masyarakat, budaya, ajaran agama, bahkan oleh negara. Sesungguhnya perbedaan gender tidaklah menimbulkan persoalan yang perlu digugat keberadaannya. Persoalan muncul ketika peran gender membawa persoalan yang perlu digugat keberadaannya, yaitu ketidakadilan yang disebabkan oleh perbedaan gender.

Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Hal yang dapat memicu ketidakadilan adalah perbedaan gender yang disebabkan baik oleh tatanan patriarki yang mendarah daging serta oleh konsep gender yang tertanam kuat di dalam masyarakat. Mayoritas kenyataan yang terjadi, korban ketidakadilan gender adalah perempuan. Bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan mendorong munculnya usaha untuk mengatasi ketidakadilan tersebut yaitu gerakan feminisme. Gerakan feminisme merupakan ideologi pembebasan perempuan menentang ideologi gender yang telah mempengaruhi kebudayaan masyarakat berabad-abad lamanya.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu:

⁶ Mansour Fakh, 2005, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 7-8.

1. **Marginalisasi perempuan.** Marginalisasi berarti penempatan atau penggeseran perempuan kepada posisi yang terpinggirkan. Hal ini dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan, seperti dalam sektor negara dan politik, ekonomi, lapangan pekerjaan, sampai ke sektor domestik. Marginalisasi dapat bersumber dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, tradisi atau kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Marginalisasi sendiri sudah terjadi dalam anggota keluarga itu sendiri dan semakin diperkuat oleh adanya adat istiadat dan tafsir agama.
2. **Subordinasi terhadap perempuan.** Adanya anggapan bahwa perempuan irasional, lemah dan emosional, sehingga memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Ciri-ciri tersebut menyebabkan sulitnya perempuan untuk menempati posisi yang penting, baik sebagai pembuat keputusan maupun sebagai pemegang kendali. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala bentuk yang berbeda-beda dan dari waktu ke waktu, tetapi terdapat suatu kontinuitas bahwa lingkup gerak perempuan dibatasi.
3. **Stereotipe terhadap perempuan.** Secara umum stereotipe adalah pelebelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu yang biasanya menimbulkan pandangan negatif yang merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Stereotipe juga bersumber dari pandangan gender yang umumnya menyebabkan ketidakadilan bagi perempuan akibat penandaan yang dilekatkan pada mereka. Contohnya adalah asumsi yang muncul bahwa perempuan bersolek untuk menarik perhatian lawan jenis mengakibatkan perempuan menjadi korban sekaligus pemicu dalam kasus-kasus kekerasan dan pelecehan. Bagaimanapun juga perempuan yang pada akhirnya dipermasalahkan.
4. **Kekerasan terhadap perempuan.** Stereotipe lain yang menyebutkan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah telah memicu serentetan kekerasan. Kekerasan adalah serangan dan invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh gender pada dasarnya disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan gender meliputi antara lain: pemerkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*), pornografi, pelacuran dan pelecehan seksual.
5. **Beban kerja terhadap perempuan.** Beban kerja yang berasal dari gender seringkali disebabkan oleh pandangan atau keyakinan di dalam masyarakat bahwa terdapat pekerjaan yang dogolongan sebagai

“pekerjaan perempuan” atau pekerjaan domestik yang dinilai lebih rendah daripada “pekerjaan laki-laki”. Perbedaan tersebut dikarenakan pekerjaan perempuan bukanlah suatu pekerjaan yang produktif atau mempunyai nilai ekonomi.⁷

Yang perlu diperhatikan adalah manifestasi dari ketidakadilan gender yang telah disebutkan di atas tidak secara baku berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain. Selain itu manifestasi ketidakadilan gender dapat terjadi di berbagai tingkatan, misalnya tingkat negara, lingkup tempat kerja, lingkungan rumah tangga, dan sebagainya.

Kesenjangan atau ketimpangan gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan ini terjadi dalam pekerjaan, pendapatan, kesempatan, dan penghargaan. Sedangkan ketidakadilan gender terjadi apabila ada diskriminasi terhadap akses dan kontrol antara perempuan dan laki-laki dalam perilaku, peran, tugas, hak, dan fungsi yang harus dijalankan. Misalnya perempuan dan laki-laki tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, memperoleh lapangan pekerjaan, dan fasilitas kesehatan yang seharusnya.

Memperlakukan seseorang atau sekelompok orang secara berbeda karena alasan jenis kelamin, umur, ras atau agama adalah diskriminasi. Diskriminasi atas dasar jenis kelamin disebut seksisme, sedangkan diskriminasi atas dasar peran, fungsi, hubungan laki-laki dan perempuan disebut diskriminasi gender. Diskriminasi gender lebih dirasakan oleh kaum perempuan, karena adanya penyangkalan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Yang menyebabkan terjadinya diskriminasi adalah kombinasi antara kebudayaan, agama, norma-norma, adat istiadat dan hukum lokal yang isinya tidak hanya menindas hak asasi yang paling mendasar tetapi juga merendahkan perempuan.⁸

Diskriminasi dan Bias Gender

Permasalahan perempuan tidak dapat dipisahkan dari persoalan ideologi, struktur dan kultur. Ketiganya saling terkait mengukuhkan suatu situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi perempuan. Ideologi patriarkal

⁸ Paul Viotti dan Mark Kauppi, *International Relations and World Politics, Security, Economy, Identity*, New Jersey, Prentice Hall, 1997, hal. 304 – 305.

bergandengan dengan ideologi gender telah memasuki struktur dan dan sistem sosiokultural masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi marginal. Nilai patriarkal yang menguntungkan status dan peran laki-laki mendorong terjadinya subordinasi peran dan status kaum perempuan. Kondisi demikian pada dasarnya merupakan manifestasi dari diskriminasi sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum dan juga agama yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan perempuan.

Istilah patriarki pada awalnya digunakan oleh Max Weber yang mengacu pada suatu sistem sosial tertentu dimana seorang ayah berkat posisinya dalam rumah tangganya bisa mendominasi anggaran keluarganya dan menguasai produksi ekonomi dari kesatuan kekerabatan tersebut.⁹ Ideologi patriarkal sebagai hasil bentukan sosiokultural masyarakat menghendaki agar perempuan tunduk dan menjadi subordinat laki-laki baik di tingkat rumah tangga, masyarakat dan negara. Patriarkat mengacu pada suatu tata hubungan dimana kepentingan atau keinginan perempuan menjadi subordinat dari kepentingan laki-laki. Patriarkat adalah sebuah sistem otoritas yang berdasarkan kekuasaan laki-laki, sistem yang mengejawantah melalui institusi-institusi sosial, politik, dan ekonomi.¹⁰

Pada era informasi ini, tantangan bagi sistem patriarki yang berasal dari kaum perempuan semakin terasa. Hal ini berkaitan dengan proses transformasi bertambahnya beban yang harus ditanggung oleh perempuan dan transformasi kesadaran dari kaum perempuan. Seiring dengan berkembang pesatnya arus informasi, sistem ekonomi global serta perubahan teknologi berkaitan dengan perbaikan reproduksi maka kaum perempuan semakin sadar dan mengerti akan hak-hak yang seharusnya dia peroleh.

Perempuan-perempuan yang telah terbuka pikirannya menyadari ketidakadilan yang terjadi disekelilingnya. Hal inilah yang mendasari perempuan untuk melakukan sebuah gerakan untuk memperjuangkan hak-haknya yang kemudian disebut sebagai gerakan perempuan atau dapat juga disebut dengan istilah gerakan Feminisme. Feminisme secara umum

⁹ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, 1997. *Perempuan Bekerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal. 49.

¹⁰ Liza Hadiz, 1998, *Feminisme Radikal dalam Politik dan Gejolak Perempuan*, *Jurnal Perempuan*, Edisi 7 Mei – Juli 1998, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, halaman.47.

didefinisikan sebagai suatu pandangan kepemilikan hak yang sama antara kaum laki-laki dan perempuan. Di dalam tubuh Feminisme terdapat berbagai aliran pemikiran, seperti :

- *Feminisme Liberal*, yang menekankan pada keadilan gender dengan membuat aturan permainan yang adil bagi laki-laki maupun perempuan serta memastikan bahwa semua dibagikan sama rata, baik yang berupa fasilitas maupun jasa. Feminisme Liberal beranggapan peningkatan kedudukan perempuan dilakukan melalui industrialisasi dan modernisasi seperti kapitalisme Liberal yang menghendaki persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang. Feminis radikal memandang penindasan atas kaum perempuan disebabkan oleh ideologi patriarkal yang mendasari pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan.
- *Feminisme Marxist*, yang mengatakan bahwa penindasan terhadap perempuan berasal dari instrumen ekonomi, sosial, dan politik yang berazaskan sistem kapitalis. Ajaran Marxis memandang penindasan perempuan adalah bagian dari penindasan kaum kapitalis dan borjuis atas kelas proletar yang harus segera dirombak untuk membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki. Feminis sosialis menentang industrialisasi kapitalistik yang menempatkan perempuan pada sektor marginal dengan upah yang rendah
- *Feminisme Radikal*, memberikan perhatian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah reproduksi dan seksualitas.
- *Feminisme Islam*, yang berawal dari munculnya kesadaran akan adanya sifat di dalam masyarakat Islam yang membuat kaum perempuan menjadi termarginalisasi, baik di dalam kehidupan keluarga maupun dalam lingkungan kerja. Marginalisasi ini diakibatkan oleh adanya kesalahan interpretasi pada teks-teks agama Islam. Akibatnya adalah tindakan yang diambil oleh kaum perempuan maupun laki-laki untuk merubah kondisi tersebut dengan mengacu pada hukum Islam sebagai pijakan. Selanjutnya, dalam Feminisme Islam terdapat keyakinan bahwa memperjuangkan Feminisme juga berarti memperjuangkan nilai-nilai Islam, karena di dalam ajaran agama Islam sesungguhnya terdapat konsep kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Memasuki era teknologi, perempuan mulai menyadari kurangnya peran mereka dalam masyarakat dan juga dalam permasalahan ekonomi. Dalam mata masyarakat, perempuan jauh terikat dengan nilai-nilai dan norma-

norma dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan dalam perekonomian perempuan terjebak dalam pekerjaan yang memberi upah rendah dan peluang karir yang sangat terbatas. Gerakan perempuan di akhir tahun 1960-an dan sepanjang tahun 1970-an mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat. Pergerakan ini berhasil menekan pemerintah untuk membuat undang-undang yang menguntungkan perempuan dan yang paling penting membuka mata dan hati masyarakat akan ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan bukan sebagai proses alamiah tetapi lebih pada adanya konstruksi masyarakat yang bias gender.

Seiring dengan berkembangnya penyebarluasan nilai-nilai demokrasi, sistem ekonomi kapitalis serta pemikiran-pemikiran Barat maka tak dapat dielakkan lagi isu tentang perempuan semakin lama semakin mencuat. Isu tentang perempuan semakin mendapat tempat dimata dunia sejak PBB mengangkatnya menjadi sebuah isu global. Hal ini dibuktikan dengan dicanangkannya satu dasawarsa untuk mengangkat isu-isu perempuan pada tahun 1975-1985. Kemudian isu perempuan menjadi semakin banyak dibicarakan dengan diselenggarakannya forum-forum dunia untuk membahas isu-isu perempuan seperti pada Konperensi Wanita Internasional di Meksiko pada tahun 1975, Kopenhagen pada tahun 1980, Nairobi pada tahun 1985 dan Beijing pada tahun 1995. Dalam dua puluh tahun terakhir, gerakan perempuan menempuh jalur hukum internasional untuk mencari alat-alat perlindungan terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak-hak perempuan yang terus berlangsung dalam masyarakat. Dengan demikian baik badan-badan internasional maupun pemerintah-pemerintah dunia menyusun konvensi-konvensi internasional yang dapat memperbaiki status dan kedudukan perempuan di dalam masyarakat.

Analisis Gender dan Kebijakan Pembangunan

Pada tahun 1948, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diprakarsai PBB telah memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.¹¹ Akan tetapi saat ini masih jelas bahwa kemajuan kearah persamaan antara perempuan di kebanyakan negara masih jauh dari cita-cita awal. Selain itu, fakta menunjukkan bahwa perbedaan antara kondisi perempuan di beberapa negara lebih besar daripada perbedaan antara laki-

¹¹ Office of the High Commissioner for Human Rights, <http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm>, diakses tanggal 1 Desember 2008.

laki dan perempuan di dalam satu negara. Sebagai contoh, angka harapan hidup di Kuba adalah 74 tahun sementara di Chad 43 tahun. Tingkat buta huruf penduduk perempuan bervariasi dari 99 % di Ethiopia sampai kurang dari 1 % di Barbados. Bahkan di dalam satu negara, perempuan bukan kelompok yang homogen akan tetapi dapat dibedakan melalui kelas, etnis, dan tingkat harapan hidup. Maka pengukuran sosio-ekonomis menunjukkan perbedaan yang lebih besar pada perempuan daripada laki-laki dan yang terbesar terjadi di negara-negara di dunia ketiga.

Akhir dekade pembangunan ketiga seperti yang dicanangkan oleh PBB belum lagi berakhir, sementara dekade untuk perempuan telah berakhir pada konferensi di Nairobi pada tahun 1985. Kesimpulan dari dekade pembangunan pertama dan kedua menunjukkan bahwa masalah kemiskinan, penyakit, tingkat buta huruf di negara-negara dunia ketiga telah meningkat. Selama dekade 1980an, telah terjadi peningkatan utang negara-negara dunia ketiga dan kelaparan akut di Afrika. Bersamaan dengan itu, penetapan dekade untuk perempuan hanya melihat perubahan yang sangat terbatas pada sikap patriarki, yaitu dominasi laki-laki yang diinstitutionalisasikan, dan di beberapa kawasan ketika modernisasi diasosiasikan dengan bertahannya subordinasi perempuan. Maka meskipun terdapat sedikit perubahan, penetapan dekade perempuan oleh PBB memberi kesadaran baru mengenai kebutuhan untuk memperhitungkan perempuan ketika melakukan perencanaan pembangunan. Pada *Amandemen Percy* tahun 1973, AS menjamin perempuan harus secara khusus dimasukkan dalam semua proyek dari agen pembangunan internasional.¹² Negara-negara persemakmuran Inggris menetapkan perempuan dan program pembangunan pada tahun 1980 didukung oleh semua negara. Di banyak negara dunia ketiga, organisasi-organisasi perempuan dan jaringannya dalam tingkat lokal dan nasional telah memainkan peran yang besar untuk memulai dan menerapkan proyek-proyek pembangunan. Di atas semua itu, dekade perempuan merealisasikan koleksi data dan penelitian yang diperlukan untuk mendokumentasikan kondisi perempuan diseluruh dunia.

Tiga tema dasar telah muncul dari literatur tentang perempuan dan pembangunan. Pertama, realisasi bahwa semua masyarakat mempunyai perempuan-perempuan yang melek huruf tetapi berpartisipasi rendah pada

¹² Amandemen undang-undang ini mengacu pada nama seorang senator yang mengusulkan perubahan. Isinya mengenai tuntutan untuk membentuk kantor urusan perempuan dalam lembaga seperti USAID. Lihat di: Jane S. Jacques dan Gale Summerfield (eds), 2006, *Women and Gender Equity in Development; Theory and Practice*, Duke University Press, hal. 23.

sektor-sektor pekerjaan formal, contohnya dalam bidang pertanian. Kondisi ini merupakan citra negatif mengenai situasi di Afrika Sahara bagian Selatan. Di wilayah ini, perempuan memainkan peran utama dalam produksi pertanian tetapi menderita karena buta huruf dan tingkat harapan hidup yang rendah.

Perempuan dan pembangunan juga terkait dengan masalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup ketika melahirkan menjadi indikator tunggal yang paling penting untuk membahas kesejahteraan perempuan di negara-negara dunia ketiga. Di negara-negara maju, rata-rata usia harapan hidup bervariasi dari usia 81 tahun di Jepang dan 73 tahun di Romania. Di negara-negara berkembang, angkanya berkisar dari 79 tahun di Hongkong dan 37 tahun di Afghanistan. Usia harapan hidup perempuan yang paling rendah terdapat di negara-negara Afrika Tropis dan Asia Selatan. Negara-negara seperti China, Haiti dan Somalia, yang memiliki GNP yang sama dengan Afganistan yaitu sekitar USD 300 pertahun, memiliki angka harapan hidup perempuan sebesar 71, 56 dan 49 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa bahkan negara-negara miskin dapat meningkatkan kesejahteraan hidup perempuannya dengan cara menerapkan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar, selain memberikan jaminan ketersediaan makanan, jaminan kesehatan dan pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Di dalam satu negara dan kawasan yang sama juga terdapat perbedaan-perbedaan. Contohnya, di Malaysia angka harapan hidup 59 tahun (1965) meningkat menjadi 72 tahun (1987). Di negara yang sama, angka harapan hidup laki-laki meningkat hanya dari 56 menjadi 68 tahun, tetapi di Sabah, Malaysia Timur, angka harapan hidup perempuan tahun 1970 adalah 45 tahun yaitu 3 tahun lebih rendah daripada penduduk laki-laki.

Angka harapan hidup laki-laki dan perempuan bervariasi dalam berbagai tahapan kehidupan mereka. Di dalam tahun pertama kehidupan, laki-laki lebih rentan daripada perempuan terhadap penyakit yang sering dialami oleh bayi sementara pada usia lanjut perempuan cenderung hidup lebih lama karena lebih sedikit penderita penyakit jantung perempuan. Jika ada deviasi dari norma-norma ini biasanya menunjukkan perbedaan lokasi geografis dan faktor-faktor budaya khusus. Hal ini dapat diilustrasikan dalam referensi mengenai rasio jenis kelamin yang menunjukkan usia berbeda-beda di Libya, yaitu negara yang relatif kaya karena perekonomiannya ditunjang oleh ekspor minyak. Piramida penduduk Libya (1973) menunjukkan rendahnya angka harapan hidup perempuan usia produktif. Pelayanan kesehatan yang buruk tampak dari tingginya angka kematian bagi perempuan pada usia dini

dan usia produktif ketika perempuan berada dalam usia mengasuh anak memiliki risiko kematian yang paling tinggi bagi perempuan. Hal ini menghasilkan pola piramida penduduk yang tidak lazim yang menunjukkan proporsi usia harapan hidup laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Angka peningkatan ini juga ditunjukkan oleh rendahnya laporan mengenai penduduk perempuan selain oleh repatriasi laki-laki Libya yang dapat ditarik pulang dari luar negeri. Repatriasi berhasil setelah Libya mengalami kemajuan ekonomi pasca ditemukan dan dioperasikannya tambang-tambang minyak.¹³

Selama periode pertumbuhan ekonomi dan perubahan politik yang pesat di Libya, terjadi dinamika perubahan rasio jenis kelamin. Data tahun 1954 menggambarkan pola tradisional kematian bayi dan rendahnya usia harapan hidup, keduanya menunjukkan bahwa perempuan lebih mampu bertahan daripada laki-laki. Tingginya tingkat kematian dan migrasi jangka pendek laki-laki berinteraksi sehingga menghasilkan rasio jenis kelamin yang berbeda-beda pada tahapan kehidupan penduduk. Melalui kebijakan-kebijakan pembangunan, angka kematian bayi dapat dikurangi dari 300 per 1000 kelahiran (tahun 1954) sampai ke angka 39 (tahun 1978) yaitu ketika penghasilan negara dari minyak mendominasi perekonomian nasional. Konsekwensi dari meningkatnya angka harapan hidup bagi bayi laki-laki terefleksikan pada perbandingan rasio penduduk pada tahun 1964 dan seterusnya. Berkurangnya bias pembangunan yang menitikberatkan pada laki-laki digambarkan dalam rasio jenis kelamin untuk semua usia tahun 1985, yang merupakan hasil meningkatnya fasilitas kesehatan untuk perempuan. Hal ini terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kolonel Muammar Qaddafi untuk meningkatkan status perempuan dalam masyarakat yang sangat tradisional dan patriarkal, selain melalui berbagai kebijakan pembangunan dan distribusi dari hasil minyak yang lebih baik.

Isu Gender di negara berkembang; Kasus Indonesia

Persepsi tentang eksistensi perempuan pada masyarakat Indonesia, masih menempatkan kaum hawa dalam posisi *inferior*. Fakta yang muncul dimasyarakat, kenyataannya masih ditemui keberadaan perempuan belum ditempatkan sebagai mitra setara. Dalam hubungan keluarga, perempuan masih dianggap sebagai warga negara kelas dua atau “teman dibelakang”.

¹³ Janet Henshall Momsen, *op.cit*, hal.10.

Fakta lainnya, misalnya dalam dunia politik, selama 8 (delapan) kali Pemilu dilaksanakan, pada lembaga legislatif sekitar 97% masih diisi oleh laki-laki. Bahkan, ada DPRD yang 100% laki-laki, apalagi di Badan Perwakilan Desa. Didalam kebijakan publik kepentingan perempuan nyaris tidak diperhatikan, kurangnya perlindungan hukum terhadap perempuan, dibidang pendidikan bacaan sekolah masih menomorduakan perempuan. "Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sering hanya dikiaskan *suwargo nunut neroko katut* (masuk surga ikut, masuk neraka terbawa). Posisi dan kedudukan perempuan didalam masyarakat diharapkan akan semakin kuat dengan dikeluarkannya berbagai regulasi yang mengatur penempatan perempuan sejajar dengan kaum laki-laki. Di Indonesia regulasi mengenai gender ini diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Untuk mengimplementasikan UU tersebut, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dan dalam pelaksanaan operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Nomor 132 Tahun 2003 (Kepmendagri 132) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah.

Berdasarkan kondisi di lapangan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah masih terdapat kesenjangan gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi, maupun dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Keputusan Mendagri 132 ini merupakan penyempurnaan Surat Edaran Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 050/1232/SJ tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Jika dilihat dari peranan perempuan yang tergambar dalam *Gender Related Development Index* (GDI),¹⁴ maka Indonesia berada dalam urutan ke 90, masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura pada urutan ke-28, Malaysia pada urutan ke-52, Thailand pada urutan ke-61, lalu Filipina pada urutan ke-66 dan bahkan Vietnam pada urutan ke-87.¹⁵ Dilihat dari tingkat pendidikannya, pada tahun 1999, 54% perempuan hanya memiliki pendidikan SD, atau kurang 19% berpendidikan SMP dan 27% berpendidikan SMA atau lebih. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa di Indonesia ada tantangan

¹⁴ Laporan Human Development Report, lihat di : http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/gdi_gem/, diakses tanggal 1 Desember 2008.

¹⁵ United Nations Development Programme, lihat di : <http://hdr.undp.org/en/>, diakses tanggal 1 Desember 2008. diakses tanggal 26 November 2005.

pemberdayaan dan peran perempuan yang serius terhadap pembangunan. Kondisi ini searah dengan tuntutan globalisasi dan demokratisasi, dimana perlu disusun strategi kebijakan penanganan yang optimal dan *holistic*.

Diskriminasi terhadap perempuan Indonesia didukung oleh budaya yang patriarki, yang menyebabkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan sehingga terjadi kedudukan yang tidak seimbang dengan laki-laki dalam urusan keluarga maupun dunia kerja atau bisnis. Karena budaya patriarki yang membuat wanita dianggap sebagai makhluk yang lemah dan laki-laki menjadi makhluk yang kuat, maka terjadilah pembagian kerja di dalam kehidupan sehari-hari sehingga muncul bias gender.

Dari berbagai kajian dan analisis yang ada, dapat dikelompokkan sekurang-kurangnya ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pengaruh tata nilai sosial budaya yang masih menganut paham patriarki, yaitu keberpihakan yang kuat terhadap kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Tata nilai tersebut diwariskan secara turun temurun dari waktu ke waktu, baik yang berasal dari budaya lokal maupun pengaruh dari luar.
2. Banyak produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik formal maupun informal (hukum adat) yang bias gender. Hal ini dapat dipahami karena produk hukum tidak terlepas dari pengaruh untuk mengakomodasi tata nilai kultural suatu masyarakat.
3. Dampak lebih lanjut muncul kebijakan dan program pembangunan yang masih bias gender karena setiap kebijakan adalah keputusan politik yang merupakan bagian dari aspirasi sosial masyarakat.
4. Kondisi itu didukung oleh masih banyaknya penafsiran terhadap aktualisasi ajaran agama yang kurang tepat karena terlalu berat kepada pendekatan tekstual (tersurat) dan parsial (sepotong-sepotong) dibandingkan dengan pemahaman tersirat dan menyeluruh.
5. Kelemahan, kurang percaya diri, dan inkonsistensi serta tekad kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Kelemahan itu bisa disebabkan pengaruh tata nilai diatas atau kemungkinan faktor lain masih perlu ditelaah secara mendalam.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan bahwa satu jenis kelamin tertentu lebih penting dibandingkan dengan yang lain. Pembentukan

stereotype (masalah pelabelan negatif), kekerasan, beban ganda berupa kerja yang lebih banyak dan lebih panjang, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.

Marginalisasi kaum perempuan dapat dilihat dari tanggung jawab perempuan yang hanya difokuskan pada *domestic works* (kegiatan rumah tangga), kecilnya kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi terutama di daerah pedesaan, seringkali perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif dalam pekerjaan seperti mendapatkan bayaran yang lebih rendah. Perempuan juga jarang menempati posisi-posisi strategis dalam berbagai bidang karena laki-laki dianggap lebih rasional sehingga diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dalam bidang politik, perempuan kurang terwakili dalam berbagai organisasi politik dan masyarakat. Untuk alasan-alasan tersebutlah maka perempuan Indonesia memerlukan pemberdayaan untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Meningkatkan Pengarusutamaan dan Kesadaran Gender

Ibu adalah sekolah bangsa; jika mempersiapkan seorang ibu dengan baik, maka sedang dipersiapkan bangsa yang tangguh. Pendidikan dimana proses belajar di ruang formal maupun non formal terjadi, adalah syarat bagi keberhasilan melakukan transaksi kehidupan.¹⁶ Di Indonesia, tokoh-tokoh seperti R.A.Kartini dan H.R Rasuna Said telah berjuang untuk pendidikan kaum perempuan. Nasib perempuan, bagaimanapun hebatnya dibicarakan dan diseminarkan, saat ini masih menjadi ironi. Jika ada kemiskinan di sebuah negeri, maka perempuanlah kelompok yang paling miskin, jika ada kelompok buta huruf, maka perempuanlah yang banyak buta huruf¹⁷

Akan tetapi, statistik perempuan Indonesia menunjukkan ketimpangan yang menyolok. Ini bisa dilihat misalnya pada data statistik Indonesia untuk pendidikan dan kebudayaan yang dikeluarkan Bappenas 1997. Antara tahun 1980-1990, angka masuk sekolah laki-laki dan perempuan selalu lebih rendah dibanding laki-laki dan semakin tinggi tingkat pendidikan semakin kecil siswa perempuannya. Jika dirunut ketimpangan pendidikan perempuan dikarenakan masyarakat masih berorientasi pada kepentingan laki-

¹⁶ Hari Setiyowanto, Ibu Berkualitas Matahati Bangsa, <http://www.kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=68>

¹⁷ Ann Hartfiel, In Support of Women: Ten Years of Funding by The Inter-American Foundation, September 1982, hal. 2.

laki (*male oriented*). Dengan konsep anak laki-laki kelak menjadi kepala keluarga, maka sebuah keluarga dimana terdapat anak laki-laki dan perempuan dengan ekonomi pas-pasan akan mendahulukan pendidikan tinggi anak laki-lakinya daripada anak perempuan.

Anggaran pemerintah terhadap pendidikan di banyak negara (terutama negara berkembang), memang lebih kecil dibanding anggaran untuk pos-pos lain. Hal ini menyebabkan pendidikan bukan saja konsumsi mewah yang tak banyak dijangkau masyarakat umum, namun juga menciptakan masyarakat berkelas; orang awam dan orang berpendidikan. Hanya yang punya uang yang mampu sekolah, apalagi beasiswa tidak untuk semua orang.

Kemiskinan tentu bukan satu-satunya sebab yang memarginalkan perempuan, karena paham *male oriented* juga sebanding dengan budaya yang kuat mengakar bahwa perempuan tidak sepantasnya berpendidikan tinggi karena nanti hanya akan ke dapur. Persepsi ini tidak diluruskan bahwa peran di dapurpun menuntut pengetahuan. Budaya bahwa perempuan adalah *konco wingking*, sehingga tak perlu dididik juga turut mensubordinatkan perempuan. Fakta-fakta di atas menunjukkan betapa pendidikan, dalam arti yang sebenarnya, bagi perempuan bukan ketertinggalan yang harus dikejar, tapi dilanggengkan.

Diakui bahwa saat ini banyak perempuan yang sudah memegang peranan penting, tapi itu hanya representasi kecil yang belum mewakili populasi, selain juga tidak semuanya mempunyai kesadaran gender. Selain itu, lingkungan pendidikan keagamaan juga turut berperan membentuk persepsi ini. Selain faktor-faktor di atas, adanya trend bahwa perempuan yang sekolah tinggi kemudian tidak mengembangkan karirnya dan memilih kembali ke ruang domestik menimbulkan persepsi bahwa memang tugas perempuan adalah mengurus rumah tangga dan ini tidak dianggap sebagai pilihan sadar individu. Faktor-faktor diatas juga sebenarnya disadari telah dikembangkan secara budaya, dikukuhkan oleh negara, dinikmati laki-laki dan juga diamini perempuan.

Kesimpulan

Dari uraian diatas tampak bahwa di negara-negara berkembang, masalah kesadaran gender masih merupakan komoditas studi dan penelitian pada tingkat konsep. Pengarusutamaan gender belum diterapkan dalam berbagai program pembangunan. Ketimpangan dalam kesadaran gender

menyebabkan program-program pembangunan masih ditinjau dari kaca-mata kepentingan laki-laki, sementara perempuan tetap berada di garis belakang dalam proses pembangunan. Perempuan tetap menjadi kelompok yang termarginalisasi sebagai akibat modernisasi dalam pembangunan dan dipergunakannya teknologi modern yang tidak ramah terhadap perempuan.

Selain itu terdapat beberapa kesamaan yang dapat ditinjau dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang terkait dengan isu gender, yakni semua kelompok sosial telah mengembangkan divisi pekerja sesuai jenis kelamin tetapi hal ini bervariasi antar satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Lebih lanjut, pembangunan ekonomi cenderung membuat hidup mayoritas perempuan di dunia ketiga lebih sulit. Jika tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan yang mengarus-utamakan gender, proses marginalisasi perempuan akan terus berlangsung. Lebih lanjut, indikator kualitas hidup menunjukkan variasi yang besar antara negara-negara dan antara laki-laki dan perempuan. Tidak dipungkiri bahwa peran dan status perempuan menunjukkan pola regional yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, 2002, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harfield, Ann, 1982, *In Support of Women: Ten Years of Funding*, The Inter-American. Foundation (IAF), Washington D.C, September.
- Jacquette, Jane S, dan Gale Summerfield (eds), 2006, *Women and Gender Equity in Development; Theory and Practice*, Duke University Press,
- Mansour Fakih, 2005, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Momsen, Janet H, 1991, *Women and Development in the Third World*, Routhledge, London.
- Potter, Nancy, 2001, *Feminism*, *Journal of Phylosophy, Psychiatry, Psychology*, Vol. 8 No. 1, Maret, The John Hopkins University Press.
- Saptari, Ratna, dan Brigitte Holzner, 1997, *Perempuan Bekerja dan Perubahan Sosial*:

Sebuah Pengantar Studi Perempuan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Viotti, Paul dan Mark Kauppi, 1997, *International Relations and World Politics, Security, Economy, Identity*, New Jersey, Prentice Hall.

Liza Hadiz, 1998, *Feminisme Radikal dalam Politik dan Gejolak Perempuan*, Jurnal Perempuan, Edisi 7 Mei – Juli 1998, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Websites

Office of the High Commissioner for Human Rights, <http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm>

Laporan Human Development Report: http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/gdi_gem/,

United Nations Development Programme: <http://hdr.undp.org/en/>

Hari Setiyowanto, 2005, *Ibu Berkualitas Matahati Bangsa*, <http://www.kbi.gemari.or.id/beritadetail.php?id=68>,